

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan ekonomi masyarakat pada era saat ini tidak terlepas dari dunia perbankan. Sejatinya perbankan merupakan mitra masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Sebagian besar kebutuhan ekonomi masyarakat berkaitan erat dengan industri perbankan mulai dari memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Industri perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Peran aktif perbankan mampu mendorong terjadinya hubungan perekonomian perdagangan internasional antar negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Peranannya yang penting menyebabkan industri perbankan sebagai industri *high regulated* dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dibandingkan industri lainnya.

Perkembangan di dunia perbankan saat ini sangat pesat dan tingkat kompleksitas yang tinggi sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat yang dapat berpengaruh terhadap performa suatu bank. Kompleksitas usaha perbankan yang tinggi mencakup fungsi dasar bank sebagai lembaga keuangan depositori dan menyalurkan dalam bentuk simpanan serta investasi sebagai bentuk fungsi intermediasi. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko

yang dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Selain itu risiko yang dihadapi bank juga dapat berasal dari kondisi eksternal yaitu krisis moneter.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 membawa dampak pada sektor perbankan. Menurut Pohan (2002), krisis moneter di Indonesia secara umum dapat dikatakan merupakan imbas dari lemahnya kualitas sistem perbankan.

Survei dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks *corporate governance* paling rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Sehingga diduga rendahnya nilai GCG menjadi penyebab atas kejatuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pemicu rendahnya GCG terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*.

Berdasarkan UU No.6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Bank Indonesia selaku bank sentral memberikan perhatian khusus terkait pengaruh antara penerapan *good corporate governance* dan kinerja perbankan. Hal ini tampak pada pemberlakuan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 yang mengatur penerapan standar *good corporate governance* bagi bank umum di Indonesia, yang kemudian direvisi PBI No. 8/14/PBI/2006, dan kemudian dilengkapi dengan penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/15/DPNP pada 29 April 2013 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum.

Para pemegang saham sebagai prinsipal menghendaki dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan yang dapat diwujudkan oleh manajer selaku agen yang diangkatnya. Hanya saja seringkali ditemukan para manajer memiliki tujuan lain selain tujuan dari pemegang saham, bahkan dapat saling bertentangan, sehingga muncul yang biasa disebut dengan *agency problems* (problem keagenan). *Agency problems* muncul ketika manajer memiliki insentif untuk memenuhi kepentingan pribadinya yang merugikan *shareholders* (Agrawal dan Knoeber, 1996). Prinsipal dalam mengatasi *agency problems* biasanya menerapkan *corporate governance*.

Penerapan *Corporate Governance* semakin gencar dilakukan semenjak munculnya skandal akuntansi seperti kasus Enron, dan Worldcom yang melibatkan akuntan. Di Indonesia juga telah tercatat beberapa kasus yang melibatkan persoalan laporan keuangan seperti PT. Lippo Bank dan PT. Kimia Farma yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005). Penerapan *Corporate Governance* pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. *Corporate Governance* diperlukan untuk memberikan kemajuan

terhadap kinerja suatu perusahaan, menjadikan perusahaan berumur panjang dan dapat dipercaya oleh para pihak yang berkepentingan.

Corporate governance menjadi isu yang sangat menarik dari waktu ke waktu, khususnya mulai dikenal pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan karena lemahnya praktik *corporate governance*. *Corporate governance* mengalami perkembangan sebagai reaksi terhadap berbagai kegagalan korporasi sebagai akibat dari buruknya tata kelola perusahaan. *Corporate governance* merupakan mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajemen (Dallas, 2004). Mekanisme tersebut dapat dijalankan melalui pengawasan yang melibatkan pemegang saham mayoritas dan tindakan manajemen berupa mekanisme internal: yaitu struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, dan mekanisme eksternal: yaitu pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, serta audit oleh auditor eksternal (Babic, 2005).

Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi tindakan direksi (Daniri, 2014). Semakin banyak anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direalisasikan jauh lebih

banyak (Bukhori dan Raharja, 2012). Proporsi komisaris independen merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan yaitu merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi (Handayani dan Imam, 2015). Dewan komisaris independen, diharapkan mampu berfungsi dalam pengawasan terhadap dewan direksi dan manajemen perusahaan menjadi lebih optimal dan penilaian atas kinerja manajemen menjadi lebih objektif (Widagno dan Chariri, 2014).

Pernyataan diatas menunjukkan penerapan *corporate governance* dan *capital adequacy ratio* yang baik sangat penting. Hal ini menyebabkan peneliti ingin mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* dan *capital adequacy ratio* terhadap kinerja perbankan. Selain itu peneliti tertarik untuk meneliti perkembangan *corporate governance* dan *capital adequacy ratio* terhadap kinerja perbankan yang ada di negara Malaysia yang nantinya akan dibandingkan dengan negara Indoneisa, Perbandingan antar negara ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan posisi keuangan serta sejauhmana pengelolaan yang dilakukan dua negara sudah baik atau belum.

Peneliti tertarik untuk meneliti dua negara antar Indonesia dan Malaysia dikarenakan kedua negara tersebut merupakan negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki kesamaan dalam potensi melimpah berupa sumber daya alam dan manusia Malaysia. Selain itu, peneliti juga tertarik dengan kebijakan negara-negara tersebut dalam upaya proses penumbuhkembangan perekonomian khususnya dalam menilai kinerja pada

sektor perbankan. Negara Malaysia merupakan negara yang serumpun dengan negara Indonesia, namun dalam perkembangan perekonomiannya saat ini memiliki kemampuan potensial yang sangat baik di kawasan ASEAN. Hal ini terbukti dengan relatif singkatnya dalam memulihkan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997.

Dalam penelitian ini, dilakukan uji komparasi untuk masing-masing negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Terdapat enam variabel yang diujikan pada masing-masing negara yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen dan kecukupan modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009) menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sam'ani (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance dan leverage* terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2004 – 2007 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan jumlah anggota dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Listyo dan Khafid (2013) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perbankan yang diukur dengan *return on assets* (ROA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris,

komisaris independen, ukuran dewan direksi, komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan (ROA). Namun secara parsial, hanya kepemilikan institusi dan ukuran dewan direksi yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan.

Eka Hardikasari (2011) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan yang terdaftar di BEI”. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Ekowati Dyah Lestari (2011) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan, ini dilakukan terhadap 19 bank yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009. Hasilnya aktivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif. Dewan direksi dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Rasio CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko dengan kecukupan modal yang dimilikinya. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko (Wardiah, 2013).

Beberapa variabel mekanisme *corporate governance* yang digunakan pada penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti terdahulu (Bambang dan Khafid, 2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini merupakan studi komparatif yang membandingkan perbankan Indonesia dan Malaysia dengan periode tahun 2012-2015 dengan sumber data yang diambil dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia serta peneliti hanya menggunakan lima mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan proporsi komisaris independen, serta menambahkan satu variabel independen yaitu *capital adequacy ratio*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan dengan judul: **“PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP KINERJA PERBANKAN” (Studi Komparatif pada Perbankan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Tahun 2012-2015).**

B. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membatasi pembahasan untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh variabel mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan

institusional, kepemilikan manajemen, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan proporsi dewan komisaris independen.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia?
5. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia?
6. Apakah *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia?
7. Apakah terdapat perbedaan signifikan kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia?
8. Apakah terdapat perbedaan signifikan penerapan mekanisme *corporate governance* dan CAR terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi yang berkaitan dengan *good corporate governance* dan *capital adequacy ratio* di Indonesia dan Malaysia.
- b. Diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *good corporate governance* dan *capital adequacy ratio* di Indonesia dan Malaysia

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Manajemen Institusi

Diharapkan dapat dipergunakan bagi manajemen institusi sebagai bahan dan informasi dalam rangka menetapkan kebijakan maupun langkah strategik, sehingga diharapkan perusahaan dapat mengoptimalkan fungsi untuk mencapai tujuan perusahaan dengan membandingkan indicator keuangan antara Indonesia dan Singapura.

b. Bagi Investor

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk mengambil keputusan investasi khususnya dalam menilai kinerja pada suatu bank.

c. Bagi Pemerintah

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan membantu menjalankan program-program pemerintah, serta dapat mewakili dalam memberikan pelayanan, pengetahuan dan gambaran kepada masyarakat.